

"Media Sosial dan Politik: Pengaruhnya terhadap Pemahaman Politik Pemuda menuju indonesia emas 2045"

Muhammad Rizky Febriyanto¹ | Wahyoe Ilham Ramadhani²

Fidi Wincoko Putro, S.ST., M.Kom

Institute teknologi Telkom Surabaya

Abstrak

Berbicara soal politik tak lepas dari kejujuran keadilan dan kemanusiaan dari pemerintah, tak heran banyak yang melanggar aturan dan mengabaikan hukum yang sudah tertera. Di Indonesia sendiri dengan penduduk sebanyak 278,69 juta jiwa itu berehak menentukan pilihannya aka apa yang ia pilih dan ia harapkan kedepanya untuk bangsa ini. Akan tetapi sampai sekarang di Indonesia belum dianggap negara demokrasi, banyak hal yang belum terselesaikan untuk mengenai hal penegakan hukum dan lain sebagainya itu masih adanya kecurangan, ketidakadilan didepan hukum. ambil saja contoh dari ketidakadilan didepan hukum adalah politik uang atau biasa disebut dengan jual beli suara seorang yang mau mencalonkan diri sebagai pemimpin, di tahun yang mendekati pencoblosan pesta demokrasi politik ini banyak para pemimpin yang berkampanye keliling kota, turun ke masyarakat dengan memberikan sesuatu yang nantinya di harapkan memilih sang pemimpin tadi. Padahal hal ini sudah diatur dalam konstitusi politik uang yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pidana Pemilu menyebutkan pemberian hukuman terhadap imbalan ke peserta kampanye, Ketentuan itu tertuang dalam pasal 523 yang menyebutkan bahwa setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan langsung atau tidak langsung pada peserta kampanye bisa pidana penjara selama dua tahun dengan denda paling banyak Rp 24.000.000,00. Cara metode untuk mengembalikan aturan dihadapan hukum dengan adanya modal sosial dan kearifan lokal, modal sosial serangkaian nilai-nilai atau norma-norma yang diwujudkan dalam perilaku yang dapat mendorong kemampuan dan kapabilitas untuk bekerjasama dan berkoordinasi untuk menghasilkan kontribusi besar terhadap keberlanjutan produktivitas. Dan yang kedua adalah kearifan lokal Kearifan lokal berupa filsafat masyarakat Minangkabau di Provinsi Sumatra Barat, sangat kental dengan nuansa ajaran Islam, sehingga politik uang yang identik dengan suap dalam ajaran Islam adalah haram. Dosanya sama antara yang memberi suap dan yang menerima suap, sehingga perilaku politik uang dapat dicegah dengan pendekatan keagamaan melalui pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam dan juga filsafat masyarakat Minangkabau. Dari sini si penulis bisa menggambarkan bahwa politik itu bukan sekedar rame-ramenya elit, melainkan politik adalah tangan dan suara kita untuk mengubah negeri tercinta Indonesia ini. Harapanya kedepan sebagai Indonesia emas tahun 2045 anak mudanya harus diberi

pemahaman tentang hal-hal politik karena suara anak muda lah yang juga ikut memilih para calon pemimpin kedepanya untuk kemajuan bangsa dan negara kita ini

Key word : Demokrasi, konstitusi, modal sosial dan kearifan lokal

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara Abad ke-4 Sebelum Masehi sampai dengan Abad ke-6 SM. Demokrasi memiliki beberapa prinsip, seperti persamaan hak, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, seperti politik uang, korupsi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi sangat penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. [1]

Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui Pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [2]

B. Rumusan masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kita dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mendidik anak muda sejak usia remaja sudah faham apa itu politik
2. Bagaimana cara anak muda yang setiap harinya dengan *handphone* bisa teredukasi tentang pentingnya demokrasi
3. Bagaimana jika anak muda di harapkan jadi pemimpin menuju Indonesia emas kedepanya haruskah buta politik
4. Kenapa harus anak muda untuk menuju Indonesia emas 2045
5. Apa yang menjadi kekuatan anak muda untuk mendukung demokrasi Indonesia emas 2045
6. Kenapa anak muda harus berpolitik

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat membantu memahami dampak anak muda di usia remaja yang akan mengala, serta mencari solusi yang relevan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Hal ini meliputi :

1. Menjelaskan pentingnya politik dan demokrasi kepada anak muda di usia remaja 18+ yang akan ikut pemilu kedepannya
2. Merapatkan barisan anak muda agar tidak terjadi pesta politik yang gampang dibeli oleh mereka yang mau menyalonkan diri
3. Agar tidak terjadi kesenjangan politik di negeri ini
4. Memperkaya pengetahuan bagi anak muda agar bisa memutus rantai politik di Indonesia
5. Menciptakan anak muda yang jujur dan memperkaya pengetahuan untuk memimpin bangsa

D. Manfaat penelitian.

Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan anak muda Indonesia khususnya anak muda di usia 18 ke atas memahami akan pentingnya politik dan bukan juga sekedar memahami tetapi menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya apalagi di tahun pemilihan umum yang akan ada pesta kostestasi, memilih siapa yang akan memimpin negeri 5 tahun kedepan ini. Dan agar tidak anak muda ini mengalami kesenjangan politik di usia dini tersebut kesenjangan disini yang dimaksud adalah adanya ketidaksetaraan atau perbedaan yang signifikan dalam partisipasi politik, akses terhadap keputusan politik, hak-hak politik, atau distribusi sumber daya politik di antara berbagai kelompok dalam suatu masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran.

Kerangka pemikiran ini akan melibatkan aspek-aspek penting yang terkait dalam politik di Indonesia seperti contoh partisipasi politik, partisipsai politik ini akan terjadi apabila adanya keterlibatan warga negara dalam proses politik, kemudian kerangka pemikiran politik selanjutnya adalah kesenjangan informasi tidak adanya kesetaraan politik dalam memberi informasi kepada wara negara atau masyarakat sehingga kelompok atau individu yang memiliki akses terbatas terhadap informasi politik mungkin kurang mampu untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik.

F. Sistematika Penulisan.

Penulisan laporan penelitian ini akan terstruktur dalam beberapa bab sesuai dengan urutan logis. Setiap bab akan mencakup topik-topik yang relevan dengan penelitian ini, termasuk tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, analisis, serta rekomendasi dan kesimpulan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil penelitian terdahulu.

Dalam penelitian ini tinjauan Pustaka yang digunakan adalah teori-teori yang menjadi landasan penelitian, selain itu kajian Pustaka juga melalui jurnal-jurnal penelitian nasional dan internasional.

- Sebuah keniscayaan Internet menjadi media yang tidak dapat dikendalikan oleh siapa pun, termasuk oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2021 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa atau sekitar 71,5% dari total populasi. Hal ini menjadi perhatian penting karena di banyak negara, kebebasan berekspresi di media konvensional seperti koran, televisi, dan radio, masih terbatas dan terkendali oleh pemerintah atau perusahaan media besar. Namun, di internet, individu memiliki akses yang lebih besar dan dapat mengungkapkan pendapat mereka tanpa adanya sensor atau batasan tertentu. Dalam konteks komunikasi politik, hal ini memungkinkan masyarakat untuk berbicara langsung dengan para pemimpin politik, mengemukakan pendapat dan kritik, serta membangun gerakan sosial yang lebih kuat secara online. Dengan adanya internet, maka diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan politik [1]
- Mengapa harus membicarakan politik sejak dini, karena anak mudalah yang nantinya akan memimpin masa depan yang akan datang nanti Berdasarkan data dari hasil survey Centre for Strategic and International Studies (CSIS), hanya 14,6% anak muda yang memiliki keinginan untuk mencalonkan sebagai anggota DPR/DPRD. Kemudian, 14,1% anak muda ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sementara, 84,7% anak muda tidak memiliki keinginan mencalonkan diri sebagai anggota DPR/DPRD. Ada pula 85,2% anak muda yang tidak ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah[2]
- tindakan korupsi dapat dikatakan tindakan yang menghancurkan bangsa dari dalam. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang disebut sebagai tindak pidana korupsi adalah “tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak atau perilaku korupsi” [3].

B. Teori Yang Relevan.

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik, dan terutama jika kita membahas masalah politik adalah tentang adanya sifat dari kemanusiannya sendiri, seperti apa kata Gus Dur presiden RI yang nomor 4 beliau mengatakan yang lebih politik adalah kemanusiaan dan arti daripada kemanusiaan ini adalah sifat kejujuran atas sesama manusia makhluk hidup dan ada Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain, masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan lain sebagainya

Menurut Thomas P. Jenkin dalam *the study of political theory* dibedakan dua macam teori politik. Sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak. (dalam Budiharjo, 1992:30)

A. Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan menentukan norma-norma politik. Karena adanya unsur norma-norma dan nilai, maka teori-teori ini boleh dinamakan *valuitional* (mengandung nilai). Yang termasuk golongan ini adalah filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi dan sebagainya.

B. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan *nonvaluational*, biasanya bersifat deskriptif dan komparatif dan berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] PERJALAN DEMOKRASI DI INDONESIA
- [2] PENGARUH POLITIK DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA
- [3] Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era
Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat
- [4] Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Instrumen Media Sosial
- [5] PENDIDIKAN ANTIKORUPSI